

2023

**LAPORAN KINERJA  
BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK**



# **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

## **KATA PENGANTAR**



Pertama-tama Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan karunianya lah berupa pengetahuan sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dapat menyajikan laporan kinerja tahun 2023 sebagaimana Amanah Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian data dan informasi yang diuraikan dalam laporan kinerja ini berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam laporan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Meskipun, sasaran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami revisi, namun hal tersebut tetap mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Kami sangat berharap, laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja kami dan sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Kami mengajak, semua pihak bisa ikut berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa - masa yang akan datang.

Sungguminasa, 24 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**MAPPASOMBA, SE., MM**

Pangkat : Pembina utama muda

Nip. 19640715 198803 1 021

## A. LATAR BEKALANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

# BAB I



# P E N D A H U L U A N

## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1) Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

### 2) Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gowa adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik ;
- d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan penanganan konflik;
- f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi;
- g. membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Kepala Bidang;

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan dan peralatan badan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas badan;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3) Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

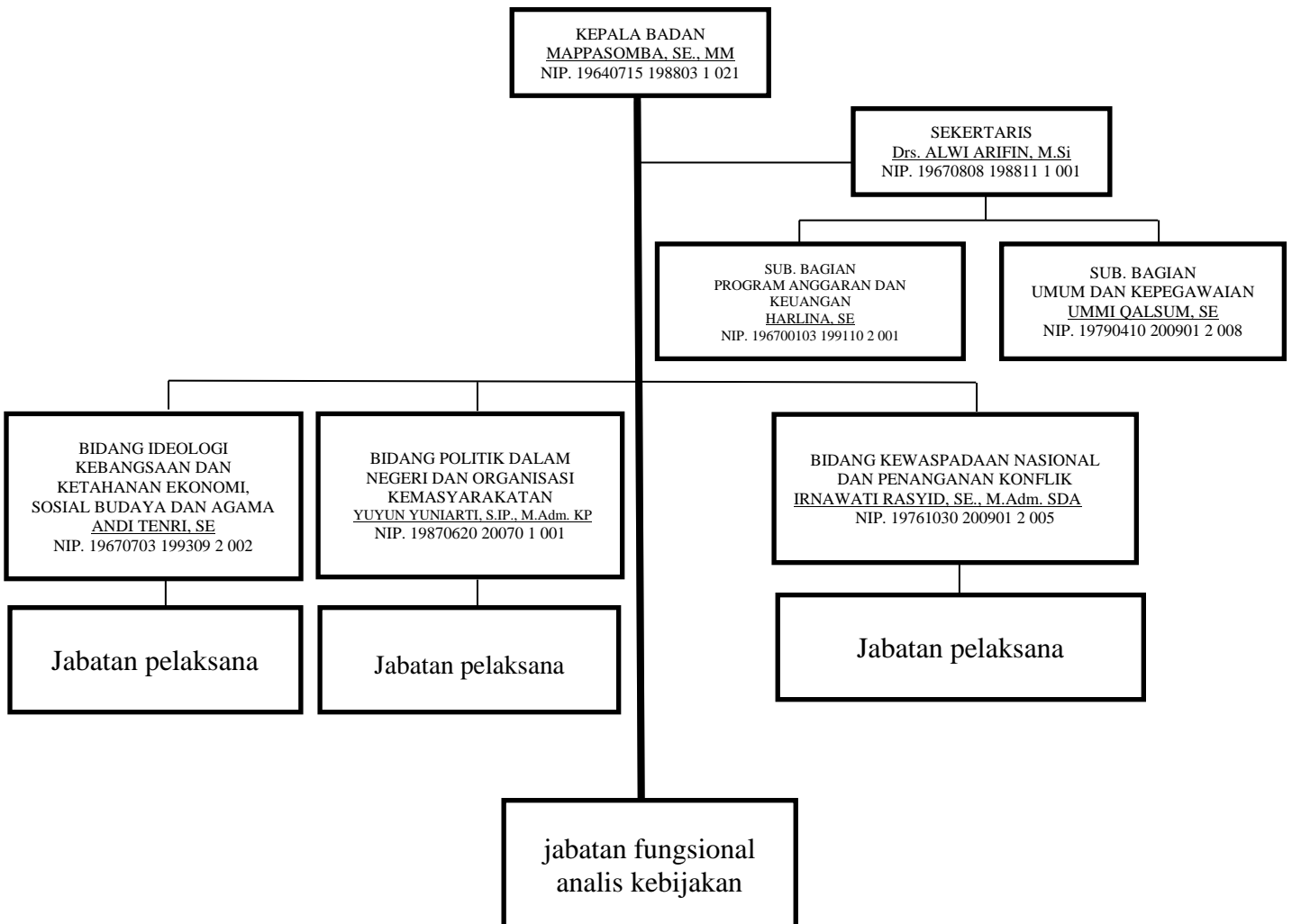
# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

## 4) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan Tahun 2023

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	IV/c	S2	1
2	IV/b	S2	1
3	IV/a	S1/S2	4
4	III/d	S1	3
5	III/c	S1	1
6	III/b	S1	1
7	III/a	S1	1

### C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya adalah :

1. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan belum berbasis gender. Masih lemahnya partisipasi organisasi-organisasi Perempuan dalam Pembangunan.
2. Masih merebaknya perilaku intoleransi di Sebagian wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sehingga menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar perilaku-perilaku demikian tidak terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa.

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

3. Perilaku intimidasi pada kelompok-kelompok tertentu yang terjadi disebagian wilayah Indonesia yang berpotensi merambah pada wilayah Kabupaten Gowa sehingga menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar perilaku-perilaku demikian tidak terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa.
4. Potensi konflik horizontal menjelang pilpres

Berdasarkan analisa isu strategis pada tahun berjalan sebagai upaya merespon dinamika sosial, maka ditetapkan target target kinerja untuk menghadapi tersebut.

### **D. STRATEGI ORGANISASI**

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan umum sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kinerja di bidang pemerintahan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan pendekatan melalui rapat koordinasi kepada tokoh-tokoh Masyarakat, agama, suku dan golongan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan menjag atali persaudaraan untuk menghindari terjadinya konflik SARA.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga telah melakukan pembinaan ormas dan mendorong organisasi kemasyarakatan untuk aktif dalam Pembangunan serta memberikan saran-saran perbaikan kepada pemerintah.



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke 1 (satu), tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

**Misi ke 1** : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang unggul dan inklusif

**Tujuan** : menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan inklusif

**sasaran** : meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan pemerintahan umum menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa Tahun

# BAB II



## P E R E N C A N A N K I N E R J A

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

2021-2026. Adapun tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya adalah :

### **Tujuan :**

1. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan
2. Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### **Sasaran :**

1. Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas Perempuan dalam pembangunan
2. Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali. Revisi dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dicapai sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja pada sasaran “meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas Perempuan dalam pembangunan” memiliki indikator “Persentase ormas yang aktif dalam Pembangunan”. Indikator ini berbeda dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun tambahan sasaran kinerja “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” merupakan kinerja tambahan untuk mengukur kinerja sasaran program dan kegiatan pada sekretariat.

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 2.1

**Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan</b>	Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaa	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan</b>	Cakupan penanganan potensi konflik SARA			100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	0	0	0

Dalam dokumen Renstra ditetapkan sasaran, indicator kinerja dan target sebagaimana tabel 2.1 di atas. Namun, dalam Upaya penajaman kinerja sasaran dilakukan revisi pada kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja pada sasaran “meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas Perempuan dalam pembangunan” memiliki indikator “Persentase ormas yang aktif dalam Pembangunan”. Indikator ini berbeda dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” merupakan kinerja tambahan untuk mengukur kinerja sasaran program dan kegiatan pada sekretariat.

### **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi serta akses seluas-luasnya kepada kelompok sosial ormas khususnya ormas berbasis Perempuan agar partisipasi kelompok Perempuan dalam Pembangunan dapat meningkat serta melakukan peningkatan kapasitas kelompok sosial ormas khususnya ormas berbasis Perempuan
2. Meningkatkan koordinasi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta instansi terkait untuk mempererat persatuan dan untuk mencegah potensi konflik berlatar belakang isu sara dalam Upaya menjaga Kabupaten Gowa dari perilaku sentimen agama, suku dan ras.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan atau penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berbasis gender
2. Peningkatan kerukunan antarasuku, agama, ras dan antargolongan
3. Peningkatan kinerja pegawai berbasis kompetensi

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan surat keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 821/BKB.P/2021 Adapun indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	0	0	0

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Tujuan 1 :** Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan Pembangunan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	20%	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	11.330.000

Pada perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, target ditetapkan berbeda dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Hal tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian dengan kondisi sumber daya yang tersedia seperti anggaran yang tidak memadai untuk mencakup seluruh organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Gowa.

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Tujuan 2 :** Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	371.326.700
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	130.400.000
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.526.100.000

**Tujuan 3 :** Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	1.887.359.396

Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan didukung oleh program Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 11.330.000. Kemudian sasaran strategis 2 didukung oleh program Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 570.236.700, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan anggaran Rp. 130.400.00,

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran 11.113.986.700.

Sedangkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung anggaran sebesar 1.887.359.396. Adapun Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tidak mendukung sasaran strategis disebabkan karena anggaran program tersebut diperuntukkan untuk dana hibah.

Selain itu, anggaran program yang disebutkan di atas berbeda dengan anggaran pada perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan anggaran pada tahun 2023. Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tabel 2.4**  
**Rincian anggaran sasaran strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	11.330.000
2	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.	11.113.986.700
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.887.359.396

Untuk sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali. Revisi dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dicapai sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja pada sasaran “meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas Perempuan dalam pembangunan” memiliki indikator “Persentase ormas yang aktif dalam Pembangunan”. Indikator ini berbeda dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun tambahan sasaran kinerja “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” merupakan kinerja tambahan untuk mengukur kinerja sasaran program dan kegiatan pada sekretariat.

Pada perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, target ditetapkan berbeda dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Politik Tahun 2021-2026. Hal tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian dengan kondisi sumber daya yang tersedia seperti anggaran yang tidak memadai untuk mencakup seluruh organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Gowa.

### E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas Perempuan dalam Pembangunan
2. Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

#### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel. 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	20%	0	0	
Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	A	Belum ada LHE	-	LHE belum dikeluarkan inspektorat

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 50 %. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2022 yang juga hanya mencapai rata-rata 50%.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2022 dan 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan		0	0					0	0			
Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan	Angka konflik berlatar belakang isu SARA		0	0				100%	100%				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP		A	Belum ada LHE				100%					

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- 1) **Sasaran strategis** : Meningkatkan partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan Pembangunan.

**Indikator kinerja** : Persentase ormas perempuan yang aktif dalam Pembangunan

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Tahun 2023 sasaran ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas yang aktif dalam proses Pembangunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja juga 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas yang aktif dalam proses Pembangunan

- 2) **Sasaran strategis** : Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan

**Indikator kinerja** : Angka konflik berlatar belakang isu SARA

Tahun 2023 sasaran ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak terjadi konflik berlatar belakang isi sara. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja juga 0 atau dengan kata lain tidak terjadi konflik berlatar belakang isi sara di wilayah Kabupaten Gowa.

- 3) **Sasaran** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Indikator kinerja** : Nilai SAKIP

Tahun 2022 sasaran ini terealisasi dengan nilai sakip A dengan nilai 80,55 berdasarkan LHE yang diterbitkan inspektorat atau dengan kategori memuaskan.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah**  
**Renstra**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah			Realisasi Kinerja			
			2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	2	3	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	0	0				
2.	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	0				

Sasaran meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan Pembangunan yang ditargetkan dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2026 sebesar 100% tidak menunjukkan kinerja yang baik. Capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya terealisasi 0 atau dengan kata lain, selama 2 tahun berturut-turut tidak ada ormas Perempuan yang aktif dalam proses Pembangunan. Adapun penyebab kegagalan dari sasaran ini akan diuraikan pada hasil analisis selanjutnya.

#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 3.4  
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2023	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	2	4	5	6
	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	0	Tidak ada target SPM / Nasional	-
2	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	Tidak ada target SPM / Nasional	-
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	Belum ada LHE	Tidak ada target SPM / Nasional	-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal atau standar kinerja nasional. Mengingat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi penunjang sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal atau standar kinerja nasional.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- 1) **Sasaran strategis** : Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan Pembangunan.

**Indikator kinerja** : Persentase ormas perempuan yang aktif dalam Pembangunan

Tahun 2023 sasaran ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas yang aktif dalam proses Pembangunan. Adapun penyebab tidak tercapainya kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan adalah sebagai berikut :

- a. Belum terbangunnya komitmen untuk berkinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan.
  - b. Tidak adanya monitoring kinerja internal dari pimpinan kepada bawahan sehingga membuat bawahan tidak memiliki disiplin kerja
  - c. Perjanjian kinerja masih sebatas dokumen-dokumen kelengkapan SAKIP, belum menjadi komitmen dan arah pelaksanaan program dan kegiatan
  - d. Pembinaan ormas sekadar menggugurkan kewajiban dalam bentuk kegiatan namun belum menyentuh substansi pendampingan ormas agar memiliki akses dan ikut berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut serta dalam Pembangunan.
- 2) **Sasaran strategis** : Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan

**Indikator kinerja** : Angka konflik berlatar belakang isu SARA

Tahun 2023 sasaran ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak terjadi konflik berlatar belakang isi sara. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan sebagaimana realisasi kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi dan diskusi secara rutin dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mengetahui kemungkinan atau potensi konflik SARA di wilayah Kabupaten Gowa
- b. Adanya kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan TNI serta organisasi kemasyarakatan untuk mencegah potensi konflik SARA di wilayah Kabupaten Gowa.



## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- 3) **Sasaran** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Indikator kinerja** : Nilai SAKIP

Tahun 2022 sasaran ini terealisasi dengan nilai sakip A dengan nilai 80,55 berdasarkan LHE yang diterbitkan inspektorat atau dengan kategori memuaskan. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan sebagaimana realisasi kinerja sebagai berikut :

- a. Mengikuti kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai ketentuan
- b. Memenuhi dokumen kelengkapan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program kegiatan.

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Tabel 3.5**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	0	0	0	11.330.000	11.330.000	100%	-100%
Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	100%	11.113.986.700	10.104.026.100	90.91%	9.09%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	Belum ada LHE	Belum ada LHE		1.887.359.396	1.657.851.289	87.84	

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator persentase ormas perempuan yang aktif dalam Pembangunan mencapai kinerja 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas Perempuan yang ikut serta dalam proses Pembangunan dan capaian anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi anggaran sebesar 100%. Inefisiensi anggaran ini disebabkan karena pemanfaatan anggaran sekadar menggugurkan kewajiban atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Indikator angka konflik berlatar belakang isu sara mencapai kinerja 0 kasus atau dengan interpretasi capaian 100% dan capaian anggaran sebesar 90.91%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indicator angka konflik berlatar belakang isu sara mengalami efisiensi anggaran sebesar 9,09%.
- 3) Indicator kinerja nilai SAKIP belum dapat dibandingkan dengan efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena nilai SAKIP dari inspektorat belum dikeluarkan.

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

**Tabel 3.6**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
<b>Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan</b>	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam pembangunan	0	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah database ormas setiap kecamatan	1	1	100%	
				Persentase usulan perempuan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	20%	0	0	
				Persentase ormas perempuan yang terdaftar	20%	0	0	
<b>Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan</b>	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah kelompok/Fungsional kerukunan	18	1	5,6%	
				Persentase wilayah potensi konflik SARA yang diawasi	100%	100%	100%	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PROGRAM (%)	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
				Persentase potensi konflik SARA yang dikendalikan	100%	100%	100%
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah database rawan konflik	18 Kec	0	0
				Jumlah Kerjasama antar instansi	6 Instansi	6	100%
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	Nilai SAKIP	Belum ada LHE	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%
				Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	4	0	0
				Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1	1	100%
				Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi	1	1	100%
				persentase pegawai dengan kinerja baik	100%	100%	100%

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

a. Sasaran strategis : Meningkatkan partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan Pembangunan

Indikator kinerja : Persentase ormas perempuan yang aktif dalam Pembangunan.

Tahun 2023 indikator kinerja ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak terjadi konflik berlatar belakang isi sara. Indikator ini dapat terlaksana melalui program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Meski demikian, program ini tidak dapat mencapai kinerja sebagaimana yang ditargetkan.

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- b. **Sasaran strategis** : Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan

**Indikator kinerja** : Angka konflik berlatar belakang isu SARA

Tahun 2023 indikator kinerja ini terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak terjadi konflik berlatar belakang isi sara. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- c. **Sasaran strategis** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Indikator kinerja** : Nilai SAKIP

Tahun 2022 sasaran ini terealisasi dengan nilai sakip A dengan nilai 80,55 berdasarkan LHE yang diterbitkan inspektorat atau dengan kategori memuaskan. Adapun tahun 2023, inspektorat belum melakukan evaluasi. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

### 2) **Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran 1:** Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan Pembangunan. Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

- a. Meningkatkan komitmen atas kinerja yang telah ditetapkan melalui monitoring pimpinan kepada bawahan
- b. meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada ormas Perempuan agar partisipasi ormas dalam Pembangunan semakin meningkat.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ormas dalam pengertian pembinaan administrasi kelembagaan ormas agar memiliki legalitas (surat keterangan terdaftar

**B. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 97.22% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut termasuk anggaran dana hibah yang tidak digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.7**  
**Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan			
	<b>Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	11.330.000	11.330.000	100%
2.	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras, dan antargolongan			
	<b>Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	570.236.700	560.276.200	98.25
	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	130.400.000	130.400.000	100%
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	10.413.350.000	9.413.349.900	90.40
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten</b>	1.887.359.396	1.657.851.289	87.84

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **A. Kesimpulan Capaian Organisasi**

Tahun 2023 sasaran meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan terealisasi 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas yang aktif dalam proses Pembangunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja juga 0 atau dengan kata lain tidak ada ormas yang aktif dalam proses Pembangunan

### **B. Langkah perbaikan kinerja**

Ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sasaran khususnya pada sasaran meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan komitmen atas kinerja yang telah ditetapkan melalui monitoring pimpinan kepada bawahan.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada ormas Perempuan agar partisipasi ormas dalam Pembangunan semakin meningkat.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan ormas dalam pengertian pembinaan administrasi kelembagaan ormas agar memiliki legalitas (surat keterangan terdaftar